

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alexander Phuk Tjilen, 2019, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Fanny Tanuwijaya, 2012, *Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*. Universitas Jember.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta
- Herlianto, 2010, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung
- Kartono dalam Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Fauzan, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah*, STAIN Press, Purwokerto
- Nanang Nugraha, 2017, *implementasi otonomi daerah dan hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Alqaprint Jatinangor, Bandung
- Riant Nugroho, 2018, *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*, Cetakan Kedua, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- R Wiyono, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cerakan Pertama, Sinar Grafika

Jurnal

Achmad Haqiqi, 2023, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember.

Anajeng Esri E, Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dalam *Jurnal Hukum Kebijakan Publik* Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, Universitas Sebelas Maret

Bagir Manan Dalam Revian Fajar, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal.

Damar Tangguh R, Diny Widya E S, Tinjauan Atas Asas-Asas Pemerintahan Daerah Dan Impelmentasi STOK, Dalam *Jurnal Relasi Publik* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, Universitas Negeri Semarang.

Genta Y, 2024, Kajian yuridis Pasal 431 terhadap kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penundaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Kabupaten Jember.

Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)* Vol. 10 No. 1 Tahun 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang.

Mario, Partisipasi Masyarakat Pada Era New Normal Di Kelurahan Perkamil Kecamatan PAAL II Kota Manado, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021.

Novita Sari, 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Ramlan Surbakti, *Defisiensi Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah*, Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 3 No. 43 Tahun 2019, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

Rahyunir Rauf, Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan, *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, Universitas Islam Riau

Rholen Bayu S, Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik* Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, Universitas Riau.

Ryza Dwi Erlinda, 2014, Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di wilayah Kabupaten Jember, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Satararuddin, Suprianto, Akung D, Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, Universitas Mataram

Internet

<https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

<https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/tahun-2023-penduduk-usia-produktif-di-jember-capai-70-persen/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

<https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/01/304/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-jember-2023.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025

<https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/794852043/bupati-jember-pastikan-umkm-mudah-dapat-permodalan-ini-penjelasan-nya>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima

